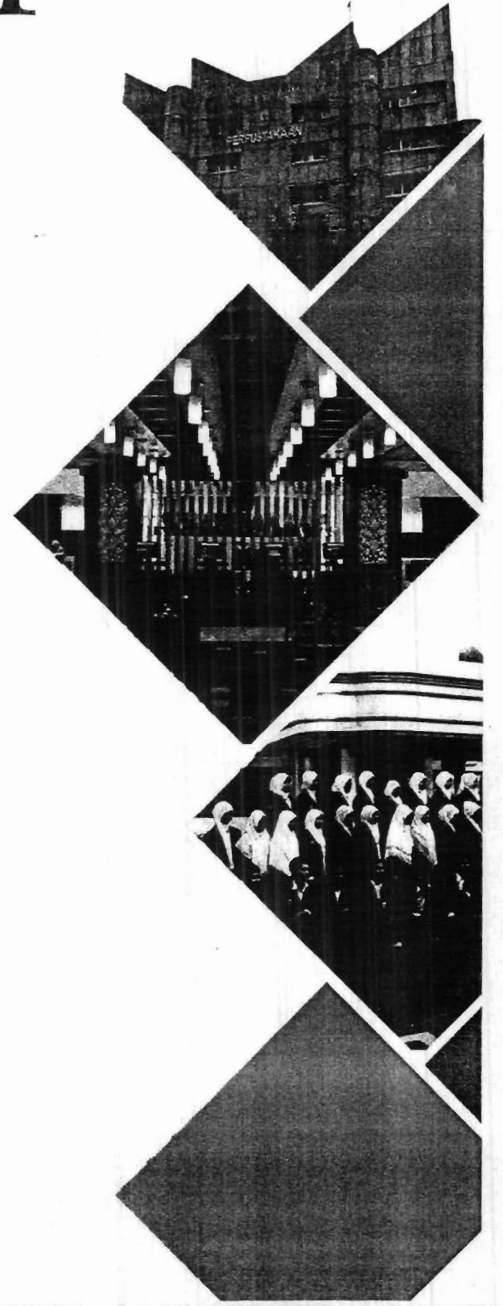


SEMINAR NASIONAL I

▶ **PERAN ILMU-ILMU SOSIAL
DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA BARU**

Padang, 15-17 Oktober 2014



**UNIVERSITAS
ANDALAS**

Prosiding Seminar Nasional Ke-1

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru

x, 854 halaman, 28 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Copyright @2014
ISBN: 978-602-71540-0-1

Penyunting:

Dr. Asrinaldi, M.Si
Drs. Syaiful, M.Si
Muhammad Hidayat, S. Sos, MA
Rendhy Atriadi, S. Kom
Dr. Indraddin, M.Si
Yayuk Lestari Sos. MA

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Alamat:

Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp/Faks. 0751-71266
Website: www.fisip.unand.ac.id



KATA SAMBUTAN DEKAN FISIP UNAND

Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar Nasional dan selamat atas terbentuknya kepengurusan HIPIIS Provinsi Sumatera Barat Priode 2014-2019 di FISIP UNAND Padang.

FISIP UNAND mendorong acara ilmuan sosial untuk memikirkan dan mencari solusi yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain itu, dengan berpartisipasi pada perkembangan ilmu-ilmu sosial peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi kontri nusi terhadap persoalan Indonesia ke depan. Indikator perkembangan tersebut salah satunya adalah dilihat dari kemunculan paradigma, teori, konsep yang digunakan oleh ilmu sosial yang mampu menjelaskan fenomena yang dihadapi masyarakat, sehingga mampu dihimpun menjadi gagasan akademis dan praktisi yang berlatar belakang ilmu-ilmu sosial untuk didiskusikan pada forum seminar nasional FISIP 2014.

Harapan kami dengan diangkatkannya acara Seminar Nasional I FISIP tahun 2014 dengan tema “Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Indonesia Baru” dapat terbentuknya “*kinship relations*” bagi seluruh peserta di tingkat nasional. Terlaksananya acara Seminar Nasional ini diharapkan dapat berlanjut menjadi wadah terbentuknya jejaring kerja antara akademisi di Indonesia, khususnya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Akhirnya, pimpinan Fakultas mengharapkan kritik dan saran peserta Seminar Nasional tahun 2014, agar pelaksanaan acara Seminar Nasional di tahun depan dapat dilakukan lebih sempurna. Kepada tim panitia seminar yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah membantu kesuksesan acara ini disampaikan terimakasih.

Padang, Oktober 2014

Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi
NIP.196406241990011002



KATA PENGANTAR KETUA PANITIA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga penyusunan buku prosiding Seminar Nasional Ke-1 dengan tema “Peran Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia Baru” dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya

Buku prosiding ini merupakan kumpulan artikel peserta seminar nasional yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah dipresentasikan di kampus Universitas Andalas, Padang tanggal 15-16 Oktober 2014. Kami menyadari bahwa penyusunan buku prosiding ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa peran dan partisipasi berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami dari kepanitiaan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, Rektor Universitas Andalas yang telah memfasilitasi kegiatan seminar nasional ini sehingga dapat dilaksanakan.
2. Bapak/Ibu panitia seminar nasional yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan seminar nasional ini sehingga terselenggara dengan baik.
3. Bapak/Ibu pemakalah yang telah menyumbangkan artikelnya sehingga penyusunan buku prosiding ini dapat terwujud.

Kami berharap buku prosiding ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, terutama sumbangannya untuk pembangunan Indonesia Baru yang lebih baik ke depan.

Kami juga menyadari terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan seminar nasional ini. Oleh karenanya, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan seminar nasional ini. Semoga di tahun hadapan, penyelenggaraan ini akan menjadi lebih baik.

Padang, 15 Oktober 2014
Ketua,

Dr. Indraddin, M.Si
NIP. 196711301999031001

Pengantar Penyunting

Perkembangan ilmu-ilmu sosial yang sangat pesat harus disikapi secara positif karena dapat memberi sumbangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini yang baru saja melakukan rotasi kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berhasil dilaksanakan dengan baik dengan membawa beberapa perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari perkembangan demokrasi yang sudah mengarah kepada arah yang lebih baik. Misalnya, ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya Pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 secara damai dan berkeadaban. Memang tidak dinafikan ada beberapa persoalan kecil dalam proses berdemokrasi yang berlangsung tersebut. Namun dengan semangat kebersamaan masalah itu dapat diatasi karena elitnya sudah mulai berpikir bagaimana mendahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar. Sementara dari aspek lain, pemerintah juga telah berupaya memberi perhatian pada keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan menempatkan dimensi gender sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakannya. Memang kalau dilihat dari angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan keterwakilan perempuan di institusi pemerintahan masih jauh dari harapan publik, namun pemerintah sebenarnya sudah memberi landasan yang kokoh untuk pengembangan kebijakannya yang pro gender.

Dari segi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan juga menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan afirmatif pemerintah yang menempatkan perempuan sebagai figur yang harus diberi perhatian dan keistimewaan dalam proses politik sudah dilaksanakan. Namun faktanya, masyarakat masih menganggap perempuan “belum siap” untuk menjadi anuta masyarakat sehingga dukungan terhadap mereka dalam proses politik dan pemerintahan tidak maksimal. Walaupun sebenarnya kebijakan afirmatif ini menjadi paradoks dengan hakikat demokrasi prosedural yang mensyaratkan adanya kontestasi dalam proses politik (Dahl, 1971).

Bangsa Indonesia juga sedang menghadapi masalah sosial dan kemanusiaan yang masih harus ditangani secara serius. Angka kemiskinan yang masih tinggi serta pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi bawah seperti nelayan, kaum buruh tani, pedagang kaki lima, sopir, tukang ojek dan lain sebagainya masih menjadi kendala bagi kemajuan bangsa ini. Kemiskinan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia karena masih kuatnya budaya patron-klien dalam masyarakat sehingga masyarakat sulit lepas dari jeratan kemiskinan. Tidak jarang patron yang berada pada strata yang lebih tinggi kedudukannya dari klien, justru memberikan “perlindungan” yang sebenarnya merugikan klien. Patron, dalam empirisnya, cenderung mengeksploitasi klien untuk kepentingan tertentu (Scott, 1972). Tentu ini menjadi catatan sendiri bagi pemerintahan baru yang baru saja terbentuknya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan Bangsa Indonesia terlalu lambat untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi potensi yang dapat dikembangkan selama ke depan. Fenomena ini dipahami oleh Pemerintahan Joko Widodo dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautnya yang luas, tentu cita-cita untuk menjadi poros maritim dunia bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Dari bidang sosial dan budaya, Indonesia juga memiliki masalah terkait dengan jati diri bangsa yang sudah mulai tergerus dengan masuknya nilai-nilai global. Ideologi Pancasila tidak lagi menjadi anutan generasi muda karena elitnya gagal memberikan teladandalam bersikap dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan di khawatirkan, kedepan, krisis ideologi menjadi tantangan serius bagi Pemerintahan “Jokowi” ini. Kecenderungan menguatnya fenomena transnasional dan

multikulturalisme menjadi masalah besar dalam masyarakat di tengah tuntutan masyarakat untuk mengurangi peran negara dalam aktivitas masyarakat. Ini adalah implikasi kuatnya gagasan tentang pluralisme dalam masyarakat yang sadar atau tidak sebenarnya mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan.

Selama ini, pemerintah daerah juga belum maksimal kalau tidak mau dikatakan gagal dalam meningkatkan kapabilitasnya memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Umumnya pemerintah daerah belum bisa mengembangkan *e-government* dengan basis kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Jika dilihat perkembangan *e-government* yang dilaksanakan di daerah, maka yang baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah hanyalah pada tahapan awal saja, yaitu *web presence* ketimbang melaksanakan *e-democracy* sebagai tahapan tertinggi. Tingkatan *web presence* adalah tingkatan terendah dari sebuah tahapan perkembangan *e-government* yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan menyediakan informasi di situs pemerintah *per se* untuk diinformasikan ke publik (Siau & Long, 2005).

Banyak isu-isu yang berkembang dalam masyarakat inilah yang mendorong ilmuwan sosial untuk membahas dan menganalisisnya sebagai bentuk tanggung jawab moral mereka membangun Indonesia yang lebih baik. Ilmuwan sosial yang peduli dengan keadaan ini mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan mengedepankan dialektika gagasan dan fakta yang ada. Inilah sesungguhnya bagian kepedulian mereka terhadap pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan "Jokowi-JK". Paling tidak, apa yang sudah diperbincangkan dan dibahas dalam seminar nasional menjadi awal yang baik untuk membantu Pemerintahan Joko Widodo mewujudkan tujuan pembangunan di era pemerintahan baru ini.

Daftar Pustaka

Dahl, R. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press

Siau, K. & Long, Y. 2005. Synthesizing e-government stage model—a meta-synthesis based on meta-ethnography approach. *Industrial Management & Data System*, 105(4):443-458.

Scott, J. C., 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia, *American Political Science Review*, 66(71): 91-113

Daftar Isi

Kata Pengantar Dekan.....	ii
Kata Pengantar Ketua Panitia	iii
Pengantar Penyunting	iv
Makalah	
Bidang Politik	10
Desain struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang efektif sebagai upaya menghindari mal administrasi dalam tubuh birokrasi Oleh Desna Aromatika (Fisip Universitas Andalas).....	11-16
PNS Berada Di Persimpangan Menegakkan Aturan Atau Aturan Atas Nama Atasan Oleh Afrinaldy Rustam (UIN Riau).....	17-28
Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Terhadap Pelayanan Publik Oleh Suci Yuzana Andriani (Fisip Universitas Andalas).....	29-38
A'pa Alliri: Kepemimpinan Lokal Di Matajang Oleh Syamsul Bahri, Harifuddin Halim, Muhammad Masdar dan Rosmawati (Univ. Tadulako, STKIP Cokroaminoto, Univ 45 Makasar	39-48
Konstelasi Politik Lokal Pasca Pemilihan Presiden 2014 Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Sumatera Barat Oleh Asrinaldi (Fisip Universitas Andalas).....	49-59
Gerakan Sosial Sayap Politik PKS di Universitas Andalas Oleh Arifki (Fisip Universitas Andalas)	60-68
Broker dan Distribusi Politik dalam Pemilu Legislatif 2014 Oleh Irawati (Fisip Universitas Andalas)	69-77
Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat Oleh Akmal (FIS Universitas Negeri Padang)	78-101
Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Indonesia di Parlemen Oleh Audra Jovani (Universitas Kristen Indonesia)	102-111
Kiprah Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Sebuah Studi Tentang Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014) Oleh Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si (UIN Sultan Syarif Kasim Riau).....	112-130

Keterpurukan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Hias Media Massa Oleh Riri Yanti Zahrul (Fisip Universitas Andalas).....	131-142
Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Oleh Andri Rusta, Jendrius, Putri Gemala Sari (Fisip Universitas Andalas)	143-152
Representasi Kepemimpinan Perempuan Minang Di Pemerintahan Lokal Oleh Fatmariza (FIS Universitas Negeri Padang)	153-165
Menuju Pemilu Yang Demokratis Oleh Suryanef dan Al Rafni (FIS Universitas Negeri Padang)	166-174
Identifikasi Partisipasi Politik Ulama Tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Oleh Sadri Chaniago, M Soc. Sc (Fisip Universitas Andalas)	175-187
Persepsi Masyarakat Padang pada Debat Politik Capres Dalam Komunikasi Politik Pilpres 2014 di Televisi Nasional Oleh Elva Ronaning Roem (Fisip Universitas Andalas).....	188-215
Pola Kampanye Melalui Media Dan Tingkat Partisipasi Politik Oleh Kusuma Dewi (Fisip Universitas Andalas).....	216-229
Analisis Media, Partai Politik, dan DPR pada Pemilu 2014 Oleh Riswandi (Universitas Mercu Buana)	230-295
Bidang Pengentasan Kemiskinan	296
Menemu-Kenali Perangkap Kemiskinan Nelayan Oleh Ansar Arifin (Universitas Hasanuddin), Haslinda B Anriani dan Musta'inah (Univ. Tadulako), Rasyidah Zainuddin Univ 45 Makasar)	297-306
Efektifitas SKIM Program Pengentasan Kemiskinan di Kampung Jua, Kota Padang Oleh Rinaldi Ekaputra, Machdaliza, Indraddin dan Ardi Abas (Fisip Universitas Andalas)	306-321
Peran Website Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia oleh Yovi Fransiska (Fisip Universitas Andalas).....	322-331
Dilema Pembangunan Karakter Desa dan Kemiskinan (Studi Pembangunan Karakter Pedesaan Muslim yang Memperoleh Bantuan Dana Pengentasan kemiskinan di Kanagarian pariangan Batusangkar Oleh Muhammad Hidayat, Hidayati .N (STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar).....	332-359

Transparansi Informasi	360
Transparansi Informasi Melalui Website Pemerintah Oleh Neneng Nurlela (Fisip Universitas Andalas)	361-417
Efektifitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas).....	418-431
Transparansi Informasi Internal Melalui Website e-Government (Studi Kasus di Pemko Padang Panjang Oleh Maryulis (Fisip Universitas Andalas)	432-445
Efektifitas Facebook Sebagai Media Komunikasi Dua Arah Dalam Membentuk Citra Pemerintahan (Studi Pada Media Sosial facebook Humas & Protokol Kota Padang) Oleh Yeni Rizal (Fisip Universitas Andalas).....	446-456
Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Pengelolaan Komunikasi Humas Pemerintah Oleh Neni Yuniarti (Fisip Universitas Andalas)	457-466
Pemilihan Media Sosial Facebook Oleh Humas Pemko Padang Dalam Diseminasi Informasi Program Pemerintah Oleh Eka Perwita Sari (Fisip Universitas Andalas)	467-489
Arti Penting Humas Di Era Keterbukaan Informasi Publik Oleh Lili Susanti (Fisip Universitas Andalas)	490-496
Multikultural	497
Rama Agung Dan Konsep Multikultural Oleh Rois Leonard Arios (Fisip Universitas Andalas)	498-507
Dar Tradisi Ke Festival Siti Nurbaya (Studi Kasus Tradisi Malamang di Kota Padang) Oleh Zulfa dan Kaksim (STKIP PGRI Sumatera Barat)	508-523
Kejutan Cinta Warna-Warni Kontestasi Pluralisme Hukum Oleh M Rawa El Amady (P A D I Institute)	524-531
Potensi Multikultural Dalam Sosio Budaya Minangkabau (Ditinjau dari Perspektif Multikultural Kritis) Oleh Isnarmi Moeis (FIS Universitas Negeri Padang).....	532-540
Kewarganegaraan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Oleh Sri Narti (Fisip Universitas Andalas)	541-549
Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan gaya hidup masyarakat pedesaan di Sumatera Barat Oleh Nusyirwan Effendi (Fisip Universitas Andalas).....	550-568

Transnasionalisme	569
Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019: Menuju Poros Maritim Dunia Oleh Anita Afriani Sinulingga (Fisip Universitas Andalas)	570-578
Masyarakat Sipil Transnasional Dan Demokratisasi Di Indonesia Oleh Virtuous Setyaka dan Febryna Mulya Forum INDERA	579-590
Penguatan Ideologi Pancasila sebagai Modal Membangun Indonesia Baru Oleh Hendar Putranto (Universitas Multimedia).....	591-609
Strategi Marketing Public Relations PT Garuda Indonesia pada Program GFF (Garuda Frequent Flyer) Oleh Shitta Afrinadia dan Refika Mastanora (Fisip Universitas Andalas).....	610-617
Pemerintahan Lokal	618
Model Pemberdayaan Institusi Lokal dalam Pemanfaatan Remitan Migran Internasional Asal Sumatera Barat Oleh Indraddin (Fisip Universitas Andalas).....	619-636
Tata Kelola Penanggulangan Bencana Alam (Suatu Deskripsi Inter-Relasidan Kesiapan Para Pihak dalam rangka Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Pascagempa di Kabupaten Tanah Datar) Oleh Edi Indrizal (Fisip Universitas Andalas)	637-657
Revitalisasi Peran Tradisional Penduduk Lansia Dalam Keluarga Dan Komunitas Di Daerah Rawan Bencana Oleh Pawennari Hijjang (Universitas Hasanuddin) dan Ummanah (STIA ALAZKA).....	658-668
Efektivitas Komunikasi Humas Melalui Media Sosial Oleh Multia Qairanni (Fisip Universitas Andalas).....	669-682
Analisa Game Theory Politik Lokal Dana Perimbangan Propinsi Jawa Barat Oleh Tamrin (Fisip Universitas Andalas).....	683-694
Civil Sociality	695
Warung Tenda Payung Ceper (Analisis Sosiologi Perilaku Menyimpang di Pantai Padang) Oleh Wahyu Pramono dan Machdaliza (Fisip Universitas Andalas)	696-721
Kontestasi Ruang Ekonomi Kota : Studi Konflik Perebutan Ruang Ekonomi di Pasar Raya Padang Oleh Firdaus (STKIP PGRI Sumatera Barat).....	722-729
Ketidaksinambungan Program Millenium Development Goals di Pemerintahan kota Padang Oleh Amelia Arnis dan Vioni Fauzia (Fisip Universitas Andalas).....	730-737

Media Yang Efektif Dalam Mensosialisasikan PNPM Mandiri Kecamatan Kota Argamakmur Oleh Vethy Octaviani (Fisip Universitas Andalas)	738-746
Dinamika Kelompok, Kepemimpinan Dan Masalah Kelompok Menuju Kemandirian Petani: Kasus kelompok tani di sentra-sentra kakao di Kabupaten Padang Pariaman Oleh Asmawi, Rahmi Surya Dewi, Hery Bachrizal Tanjung (Fisip Universitas Andalas) ...	747-761
Pengetahuan Dan Kesadaran Perempuan Tentang Resiko Keguguran Dan Aborsi Yang Tidak Aman Oleh Sri Meiyenti dan Yunarti (Fisip Universitas Andalas).....	762-777
Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran Dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai Oleh Fachrina dan Nini Anggraini (Fisip Universitas Andalas)	778-788
Badan Pemberdayaan Keluarga Indonesia (BPKI) (Gagasan untuk pemerintah Jokowi-JK tentang masyarakat/sosial) Oleh Wahyu Gunawan (Fisip Unpad)	789-798
Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal Pada Masyarakat Minangkabau Oleh Dwiyanti Hanandini dan Nini Anggraini (Fisip Universitas Andalas)	799-824
Stagnas Keberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar Oleh Syaifullah Cangara (Fisip Universitas Hasanudin).....	825-845
Makanan Sebagai Pembeda Sosial: Suatu Kajian Perubahan Budaya Makan Oleh Yevita Nurti (Fisip Universitas Andalas).....	846-854

MAKALAH

Bidang Ilmu Politik

**POTENSI MULTIKULTURAL DALAM SOSIO BUDAYA MINANGKABAU:
Ditinjau dari Perspektif Kritis**

**Oleh Isnarmi Moeis
Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik
Universitas Negeri Padang**

Abstrak

Pergeseran kehidupan social dari monokultural ke multicultural merupakan keniscayaan bersamaan dengan berkembangnya masyarakat. Orang Minangkabau selama ini dikenal sebagai masyarakat perantau di satu sisi, dan masyarakat yang terbuka di sisi lain. Dalam interaksi dengan masyarakat lain yang berbeda budaya jarang bahkan hampir tidak pernah terdengar pertikaian yang meluas menjadi pertentangan antar suku. Sebuah penelitian yang dilakukan 4 tahun yang lalu, dengan ruang lingkup Sumatera Barat namun masih relevan untuk dibicarakan di sini yakni potensi budaya dalam masyarakat Minangkabau dalam berinteraksi dengan masyarakat budaya lain yang dikenal dengan “malakok”. Makalah ini akan membicarakan bermacam pola “malakok” yang terdapat di berbagai daerah di Sumatera Barat (Pasaman, Damasraya, Solok, dan Pesisir Selatan)., dalam tinjauan kritis.

Abstracts

Multicultural society is an unavoidable reality in our life today. Although, there is no clear concepts among scholars, multicultural keep being an interesting idea to discuss according to dynamic of the society itself. In the multicultural society, everybody has to live together with the other that different in terms of belief, race, language etc. Minangkabau people has taken care about how to deal with living together among pluralistic society without conflict. One of the values can be drawn from their life is “malakok” that found from a study conducted in 2009. There are several types of “malakok” that paper will be discussed in this paper terms of critical point of view

Key words : multicultural, “malakok”

Pendahuluan

Sumatera Barat satu dari wilayah Indonesia, yang memiliki unsur-unsur masyarakat yang beragam dari segi suku dan agama. Penduduk asli adalah etnik Minangkabau dan memeluk agama Islam. Menurut data BPS 2013, terdapat beberapa suku dan agama, dengan mayoritas penduduk beragama Islam (98,25%) dan 1.71% beragama lain seperti Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Demikian juga Minangkabau adalah sukubangsa mayoritas, sekaligus sebagai penduduk asli Sumatera Barat. Sukubangsa lain yang tergolong sedikit dan merupakan pendatang yang terdiri dari sukubangsa Jawa, Sunda, Batak, Cina, India dll, Kebanyakan pendatang dari Jawa dan Sunda datang ke Sumatera Barat melalui transmigrasi, sedangkan yang lainnya karena factor ekonomi.. Sebaliknya masyarakat Minangkabau dikenal dengan kebiasaan merantau, hampir di semua pelosok tanah air ada warga dari suku Minangkabau. Satu hal yang cukup menarik dari pembauran masyarakat Minangkabau dengan masyarakat dari suku lain hampir tidak pernah terjadi pertikaian antar kelompok (suku atau agama)

yang berlarut-larut dan menyisakan dendam yang panjang. Kalaupun ada konflik internal yang terjadi, tidak sampai menjadi konflik panjang dan mendalam, dibanding dengan konflik yang terjadi di Ambon dan Poso, dan beberapa daerah lain. Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang cukup aman dan damai di Indonesia (Kompas, 20 Januari 2002:7; Wanandi, 17 Juni 2006). Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan: mengapa masyarakat Sumatera Barat dapat bertahan dalam keragaman tanpa ada konflik antar kelompok yang berlarut-berlarut?

Fenomena ini merupakan daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam, mengapa masyarakat Sumatera Barat dapat bertahan dalam keragaman tanpa ada konflik antar kelompok yang berlarut-berlarut? Sehubungan dengan ini, pada tahun 2009 yang lalu, kami tim peneliti Universitas Negeri Padang, di bawah biaya penelitian strategis nasional, melakukan penelitian di enam kabupaten kota: Kabupaten Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi) mengenai potensi-potensi lokal yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan besar dalam enam bidang sorotan, yaitu fakta apa yang menjadi potensi konflik dan potensi integrasi alam masyarakat di bidang sosio budaya, kebijakan pemerintah, dan mentalitas. Makalah singkat ini khusus akan mengungkapkan potensi integrasi dai segi sosio budaya Minangkabau.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan survey dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian : kabupaten/kota yang heterogenitas tinggi (suku, agama, daerah pemekaran). Informan penelitian dipilih berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam masyarakat. Fokus penelitian : 1) sosiobudaya; 2) kebijakan pemerintahan lokal; dan 3) mentalitas masyarakat. Teknik pengumpulan data : wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara bertahap (pengumpulan data, pengkategorian, pengkodean kategori, dan interpretasi data).

Kategori (Pengelompokan) Wilayah Penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kategori daerah	Wilayah
Masyarakat heterogen dari segi suku agama dan bahasa, namun masyarakat asli masih kuat memegang adat	Bukittinggi, Kenagarian Painan, kab Pesisir Selatan
Masyarakat heterogen dengan masyarakat Minangkabau yang longgar dalam memegang adat. Masyarakat menggunakan adat yang disebut nasional	Kampung Jambak, Kenagarian Simpang Ampek Kabupaten Pasaman, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Sawahlunto, dan Kelurahan Tanah lapang Kecamatan Lembah segar Sawahlunto

Masyarakat heterogen dalam komunitas sendiri, tetapi di kelilingi masyarakat Minangkabau yang teguh dengan adat istiadat	Kecamatan Lunang Silaut Kab Pesisir Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai kab Darmastraya
Masyarakat homogen yang memegang adat istiadat Minangkabau	Kab Solok, dan Kecamatan Batang Kapeh, kab Pesisir Selatan, desa Salak dan Rantih di Kab Sawahlunto, Kenagarian Sasak, Kotobaru di kab Pasaman

KAJIAN TEORI

Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Kritis

Dalam Wikipedia (www.en.wikipedia.org/2005) dijelaskan pengertian multikulturalisme sebagai kebijakan publik untuk mengelola keragaman dalam masyarakat multi-etnik dan menekankan perlunya, dalam satu negara, saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan dalam masyarakat. Pengertian dalam ensiklopedia ini dilihat dari sudut negara dan kebijakan yang dibuat oleh negara, disebut juga dengan *official multiculturalism*. Namun multikulturalisme juga memiliki makna dari sisi normatif yakni sebagai prinsip atau norma.

Ada ahli yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai **pola pikir** yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, jender, dan agama (Al Muchtar, 2004: 6). Konsep ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan multikulturalisme sebagai **ideologi** yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus dengan kebudayaannya (Suparlan, 2002).

Tetapi, di kalangan ahli teori social istilah multicultural merupakan wacana yang diperdebatkan, apakah multikultural itu sebuah realitas atau teori tentang realitas (Ritzer and Smart, 2001). Nampaknya persoalan itu terkait dengan ketidakjelasan makna multicultural itu sendiri. Untuk lebih memahami multikultural sebagai sebuah realitas dan juga teori tentang masyarakat majemuk dapat dilihat dari berbagai teori dan contoh realita kehidupan masyarakat yang bernuansa multicultural. Setidaknya ada dua penjelasan awal yang dikemukakan di sini yaitu dari perspektif liberal dan perspektif islam. Dari perspektif Islam, belum ada satu teori yang bisa menjelaskan realitas masyarakat multicultural bahkan banyak juga di kalangan orang Islam di Indonesia sangat menolak paham multikultural yang dianggap merusak tatanan sosial dan nilai kemasyarakatan yang beradasrakan nilai-nilai Islam.

Namun, bila dikaji sejarah masyarakat Islam yang pertama di jaman Nabi saw tampak bahwa pola hidup masyarakat yang dibuat oleh Nabi saw di Madinah, dengan system ukhuwah (persaudaraan), dan ummat (kesatuan bangsa) di bawah satu kesepakatan bersama "Piagam Madinah"

merupakan realitas tentang kehidupan social yang bersifat multicultural (Moeis, 2009). Setiap orang atau kelompok hidup dengan identitas yang jelas, serta pengakuan hak dan kewajiban masing-masing kelompok dalam hubungan atau interaksi social. Setiap perselisihan selalu dikembalikan kepada Allah dan RasulNya (Kitabullah). Dalam pola masyarakat Madinah, kesepakatan dan ketaatan terhadap kesepakatan didasarkan pada landasan "keimanan yang kuat" dan akhlaq yang mulia". Artinya secara teoritis dapat dijelaskan bahwa masyarakat multicultural ala "Madinah" bisa terwujud bila setiap individu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah swt dan RasulNya, yang dimanifestasikan dalam kekuatan ibadah dan kemuliaan akhlaq, serta kesetiaan kepada Negara yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam Paiagam Madina"

Dalam konsep persaudaraan dan umat terdapat pengakuan terhadap identitas masing-masing golongan. Setiap golongan diberi kebebasan untuk beraktifitas sesuai dengan identitas mereka, dan setiap golongan memiliki loyalitas yang sama untuk menjaga kebersamaan dalam Negara Madinah. Inti multicultural dalam masyarakat Islam Madinah, adanya pengakuan identitas, perlindungan terhadap minoritas, dan kesetiaan terhadap kebersamaan.

Tampaknya perdebatan tentang realitas masyarakat multicultural terus bergulir, terutama dari penganut teori kritis karena pertanyaan untuk menjawab kedudukan "identitas" dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, hak dan kewajiban masih terus dipertanyakan. Menurut George Ritzer dan Barry Smart (2001) pertanyaan tentang identitas adalah pertanyaan tentang "siapa aku" yang mungkin mudah disalah gunakan. Tetapi pertanyaan itu harus dijawab. Identitas adalah satu nama abstrak yang disandang manusia dalam mengakui bahwa dia dengan sadar adalah "siapa mereka" dengan konsekwensi pilihan-pilihan yang dibuatnya di antara pilihan-pilihan yang ada, dalam rangka bergaul dengan manusia lain (Taylor, 1989, 1994 dalam Ritzer & Smart 2001). Sejalan dengan ini, Watson (2000) menegaskan bahwa dalam masyarakat multicultural ada kehendak untuk menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan "keasingan" orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan. Lebih lanjut Watson mengingatkan, bahwa dalam memahami makna multikultural, budaya (*culture*) dipandang sebagai proses dinamis dari adaptasi manusia terhadap perjalanan sejarahnya yang merupakan kondisi untuk mempertahankan kehidupan melalui keterlibatan secara simpatik terhadap cara-cara baru dalam memahami dunia dan meresponnya. Konsep identitas atau diri dalam perspektif ini merupakan sesuatu yang dinamis, dan justru disini letak keawatiran penyalahgunaan identitas tersebut.

Pemaknaan identitas merupakan ekpresi dari perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat, yang membawa implikasi lahirnya konsep "pengakuan". Dalam hubungan satu sama lain, setiap orang butuh dikenal sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang diperlakukan secara adil dan sama untuk semua orang. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat multikultural dalam pandangan kritis diukur dari keragaman yang muncul

dalam perjuangan politik tersebut (M. Sobary 2003: 28). Dalam pandangan ini, makna multicultural terlihat dalam ‘ identitas “ dan” pengakuan”.

Memang dilemmatis ketika konsep itu dihadapkan dengan nilai. Dari sisi ini, kalangan yang kontra melihat bahwa multicultural tidak memiliki bentuk, tapi bagaimanapun dia ada. Dalam perspektif “Piagam Madinah”, baik “identitas” maupun “pengakuan” merupakan sesuatu yang sudah jelas karena disepakati sesuai dengan realita yang ada. Kemungkinan, jalan tengah dari perdebatan ini, terletak pada “kemauan mengenali diri dalam “keasingan” dengan oranglain (Watson, 2000). Dari sini lahirnya istilah lain tentang hakikat pribadi (si pemilik identitas) adalah seorang berkarakter matang dengan kemampuan social yang dewasa (Moeis, 2013). Dalam tataran ini konsep multicultural merupakan nilai.

Dari dua pandangan di atas, ada kesamaan gagasan tentang multicultural yaitu dalam konsep identitas dan pengakuan. Tetapi ada perbedaan yang prinsip dari kedua ide tersebut. Pada realitas masyarakat Madinah, identitas dan pengakuan merupakan kebijakan politik dari suatu Negara yang diwujudkan oleh individu dalam pergaulan antar golongan. Pada konsep kedua, identitas dan pengakuan adalah perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan kesetaraan, dan keadilan dalam pergaulan bersama. Selanjutnya, uraian berikut akan membahas fenomena budaya “malakok” di Minangkabau dalam perspektif “identitas” dan “pengakuan”.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Pandangan hidup masyarakat Minangkabau dikenal dengan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Pandangan ini mencerminkan realita masyarakat yang religius dan memegang sendi-sendi kehidupan social yang didasarkan pada nilai-nilai agama (Islam) mayoritas penduduk. Nilai-nilai budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun tersimpan dalam berbagai kata bijak yang disampaikan kepada anak dan kemenakan. Sebagai contoh jika seorang akan merantau diberi nasehat yang berbunyi *dima bumi dipijak, di situ langik dijujuang; kok manyauak di hilia-hilia, bakato di bawah; mamak ditinggakan, mamak dicari, induak samang cari dahulu*. Makna yang tersirat dalam kata-kata bijak itu agar seseorang yang pergi ke suatu tempat hendaklah menjadi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat yang baru ditempati. Nasehat ini merupakan harapan terhadap siapa saja yang menjadi pendatang di tempat baru.

Fenomena ini yang terlihat di enam kabupaten kota yang ditemui. Di tempat tersebut (Solok, Pesisir Selatan, Pasaman, Darmasraya, Sawahlunto, kecuali Bukittinggi) setiap pendatang di daerah baru yang ditempatinya, diharapkan oleh masyarakat nagari memiliki mamak dari suku yang ada di tempat dia tinggal. Kebiasaan ini berlaku untuk semua pendatang baik dari etnik Minangkabau atau etnik lain. Bahkan pada daerah tertentu (Kecamatan. Sungai Rumbai Kabupaten Darmasraya dan Kecamatan. Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan) telah menerapkan satu aturan bahwa pendatang di daerah transmigrasi harus memilih salah satu suku yang ada di Minangkabau sebagai tanda mereka

menjadi saudara bagi orang Minangkabau. Sebutan yang lazim digunakan untuk menunjukkan fenomena ini adalah "malakok", yakni setiap pendatang di daerah baru adalah saudara bagi penduduk setempat. Dengan demikian sukubangsa pendatang akan menjadi bagian masyarakat di daerah baru.

"Malakok" dapat dilakukan oleh pendatang secara perorangan dan dapat pula secara berkelompok. Misalnya, sekelompok etnik Jawa yang bertransmigrasi ke Provinsi Sumatera Barat, mereka dapat "malakok" secara bersama-sama kepada salah seorang penghulu (atau kepada beberapa orang penghulu kalau jumlah transmigran itu banyak) di kawasan pemukiman mereka yang baru itu. Kenyataan ini terlihat pada daerah transmigrasi di Kabupaten Darmasraya dan kabupaten Pesisir Selatan. "malakok" bagi pendatang transmigrasi di Darmasraya dijadikan sebagai kebijakan pemerintah nagari. Sedangkan di pesisir Selatan merupakan kebijakan ninik mamak (tokoh informal dalam masyarakat). Namun di kedua tempat tersebut proses "malakok" masih perlu sosialisasi lebih intensif karena bagi masyarakat pendatang (transmigrasi) belum melihat pentingnya "malakok" dalam kehidupan mereka (wawancara dengan pendatang di Darmasraya dan Pesisir Selatan). Sedangkan dilihat dari segi kalangan tokoh masyarakat "malakok" bagi pendatang dianggap penting agar pendatang menjadi bagian anak kemenakan dalam nagari. Jika terjadi konflik atau permasalahan dalam masyarakat maka penyelesaiannya akan sejalan dengan filsafat adat: "*bajanjang naik batanggo turun*": penyelesaian terbawah adalah dimulai dari kalangan ninik mamak.

Sedangkan "malakok" sebagai proses perorangan hampir terjadi pada semua daerah. Biasanya proses ini terjadi pada seseorang yang pindah ke suatu tempat dan tinggal di tengah-tengah masyarakat asli. Secara otomatis orang tersebut merasa perlu untuk menyatukan diri dengan masyarakat asli, maka proses melakok pada salah satu suku yang seolah merupakan keharusan tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh pendatang. Proses ini seolah berjalan alamiah dan terjadi tanpa ada paksaan. Hal ini terjadi pada hampir semua daerah Minangkabau, sehingga berlaku filsafat masyarakat "*dima bumi dipijak di situ langik dijunjung, dima rantiang dipatah disitu aia disauak*". Artinya masyarakat pendatang sudah menjadi bagian masyarakat asli: di mana dia berada disitulah saudaranya dan kehidupannya,; orang yang berada disekitarnya itulah saudaranya. Konsekwensinya seluruh tata kehidupan masyarakat asli dan pendatang sudah selaras dan sejalan. Baik dilihat dari proses model "malakok" individual maupun kelompok mengandung implikasi terciptanya hubungan kekerabatan yang erat, sehingga proses pegayoman dan sekaligus pengawasan dapat berlangsung sejalan dengan budaya Minangkabau *bajanjang naik, batanggo turun*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, daerah penelitian ini dapat dibagi kepada beberapa kategori :

1. daerah yang heterogen namun masih kuat memegang adat (Bukittinggi, Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sasak Pasaman Barat).

2. daerah heterogen yang agak longgar dalam hal adat (Jambak, Pasaman Barat, dan Sawahlunto),
3. daerah heterogen yang di lingkari oleh masyarakat adat yang kuat (Lunang Silaut Pesisir Selatan, Darmasraya),
4. daerah homogen mayoritas masyarakat Minangkabau (Solok).

Dilihat dari kategori daerah ini, proses dan makna "malakok" terdapat sedikit perbedaan. Untuk daerah kategori satu yang heterogen dengan adat yang masih kuat, budaya "malakok" terjadi melalui kebijakan yang diterapkan oleh unsur pimpinan atau tokoh dalam nagari. Ciri khas pada daerah ini peran ninik mamak yang masih kuat sehingga diharapkan setiap orang yang datang menjadi anak kemenakan dari suku-suku yang ada. Tampaknya untuk daerah Bukittinggi, dengan heterogenitas yang paling tinggi dari daerah lain, proses "malakok" sedikit sulit diterapkan terutama untuk masyarakat yang non muslim (misalnya pendatang dari suku Batak yang cukup banyak bermukim di Bukittinggi). Jalan keluar dari kesulititan ini, adalah muncul bentuk paguyuban daerah seperti paguyuban Jawa, Batak yang masing-masing wakilnya duduk dalam lembaga adat nagari. Melalui proses ini ninik mamak di Bukittinggi merangkul pendatang menjadi bagian masyarakat Minangkabau.

Persoalan yang sangat sensitif dalam konteks pembauran masyarakat Minangkabau dalam masyarakat heterogen seperti ini adalah persoalan agama. Sebagaimana juga fenomena di tempat lain proses "malakok" sangat cepat terjadi jika pendatang dengan penduduk asli, memiliki agama dan suku yang sama. Oleh karena itu pada daerah heterogen dari segi agama, persoalan "malakok" sulit diterapkan oleh pendatang yang berbeda agama. Justru di sini sangat diperlukan sekali pemahaman yang tinggi bagi pendatang bahwa dalam struktur adat Minangkabau hanya ada satu agama orang Minangkabau yaitu Islam. Penggunaan tanah ulayat atau kaum untuk kepentingan rumah ibadah non muslim adalah sesuatu yang sulit diterima oleh masyarakat Minangkabau. Di sinilah peranan tokoh adat bagi masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan nilai budaya Minangkabau yang sangat erat dengan Islam.

Untuk daerah heterogen yang longgar dalam hal adat, proses "malakok" tidak lagi menjadi penting. Bagi penduduk yang datang dan asli akan terjadi pembauran bila mereka saling menghormati satu sama lain. Dalam konteks ini masyarakat lebih cenderung mengatakan bahwa mereka memakai kebiasaan yang bersifat nasional dalam setiap kegiatan mereka. Sebagai contoh masyarakat seperti ini adalah daerah Jambak dan Ophir di Kab Pasaman Barat, serta masyarakat kota Sawahlunto. Di Jambak dan Ophir sebagian besar adalah pendatang dari berbagai suku di luar Minangkabau. Di sini jumlah pendatang seimbang dengan jumlah penduduk asli, namun potensi konflik cukup tinggi karena factor agama.

Pada daerah kategori ketiga, meskipun masyarakat pendatang tinggal dalam komunitas sendiri, pementah dan tokoh informal dalam nagari menghendaki agar pendatang mengambil suku yang mereka sukai untuk menjadi suku mereka diMinangkabau. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikehendaki oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan kembali ke nagari. Dengan cara ini, semua anggota masyarakat punya suku, mamak dan penghulu adat mereka. Dengan demikian masyarakat pendatang tidak dipandang pendatang tetapi adalah saudara sesuku. (Lunang Silaut Kab Pesisir Selatan dan Darmasraya).

Terakhir, daerah homogen yaitu kabupaten Solok. Pada daerah ini peranan ninik mamak sangat besar dan “malakok” merupakan satu kewajaran bagi pendatang yang datang ke daerah ini. Kebanyakan pendatang berasal dari daerah lain namun masih suku Minangkabau. Oleh karena itu pendatang akan “malakok” dengan suku yang sama di tempat yang baru.

Dilihat dari fenomena “malakok” di atas dapat disimpulkan bahwa sebgai besar upaya “malakok” adalah berasal dari unsur pimpinan adat di daerah asli. Fenomena yang menarik di sini adalah adanya harapan yang kuat dari penduduk asli untuk menjadikan pendatang sebagai saudara, bukan sebagai orang lain. Dengan demikian, pendatang merasa tidak asing di tempat yang baru.

Dilihat dari teori “identitas” dan “pengakuan” terdapat pergeseran konsep dari dua model di atas. “Identitas” dan “pengakuan” bukan emansipasi individual untuk mencari kesetaraan dan keadilan dalam pergaulan di daerah baru, juga bukan kesepakatan politik antara pemerintah dengan berbagai kelompok. “Identitas” dan “pengakuan” dalam proses ‘malakok’ lebur dalam bangunan kekerabatan antara masyarakat asli dengan pendatang. Secara teoritis, makna keragaman mendapat tempat dalam kekayaan asal usul dari warga kekerabatan. oPola ini mudah dilaksanakan sepanjang ada kesamaan nilai dan system keyakinan antara pendatang dengan penduduk asli.

Berbeda halnya jika, antara pendatang dan penduduk asli berlainan agama. Dalam hal ini, peran pemerintah dan pemimpin adat sangat menentukan dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat multicultural, sepanjang adat basandi syara’, syara basandi kitabullah. Konsekwensinya berlaku hukum *di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*. Artinya, setiap pendatang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan tata aturan yang sudah berjalan di tempat baru yang ditemuinya. Dalam konteks ini bukan lagi perjuangan “identitas” dan “pengakuan” melainkan sikap ‘tahu diri’ sebagai esensi masyarakat multicultural.

Daftar Bacaan

- Al Muchtar, Suwarma (2004) "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Dalam Era Otonomi Daerah" . *Mimbar Pendidikan*, Jurnal Pendidikan, UPI . tahun XXIII no, 4, 2004.
- Moeis, Isnarmi (2009) Multiculturalism in Liberal and Islamic Perspective. *EDUCARE an International Journal* Vol 2, no 1 Agustus, 2009 p 7-14
- Moeis, Isnarmi (2014) Pendidikan Multikultural Transformatif. Padang: UNP Press
- Ritzer, George & Barry, Smart (2001) *Handbook Teori Sosial (terjemahan)* Bandung: Nusa Media
- Sobary, Mohammad (2003) The Politics of Recognition , and the Idea of Tolerance in Multicultural Societies. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXIX, No ,1, 2003. LIPI: Jakarta.
- Suparlan, Parsudi (2002) *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*. Paper.at 3 International Symposium of "Rebuilding Indonesia a Nation of "Unity in Diversity" Towards a Multicultural Society, Bali 16-18 July, 2002.
- Wanandi, Sofyan. (17 Juni 2006). Sambutan Perwakilan Warga Tionghoa pada Acara Pembukaan Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930an s/d 1960an". Padang. 18-21 Juni 2006
- Watson, C.W (2000) *Consept in Social Sciences: Multiculturalisme*. Philadelphia: open University Press.
- Wiranto. (1999). *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.